

DAFTAR PUSTAKA

- Dwitayanti, Y., & Zahara, H. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81-96.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 tentang Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta: KSAP.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Badan Pemeriksa Keuangan. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Diakses tanggal 29 Desember, dari <https://www.bpk.go.id/lkpp>
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suryanovi, Sri (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Akuntansi Pemerintah Pusat*. Tangerang Selatan. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Hamzah, Andy P & Kustiani, Nur Aisyah. (2014). *Seri Akuntansi Pemerintah Indonesia: Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta. STAN PRESS.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas
Pemerintah Pusat

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2013
tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

Merina, C. I., Verawaty, V., & Manoppo, F. A. (2019). PENERAPAN PSAP NO.
07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL
PROPINSI SUMATERA SELATAN. In *Prosiding Seminar Hasil
Penelitian Vokasi (Semhavok)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-8).

Brilliant, L., & Sulaeman, A. S. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM MANAJEMEN ASET TETAP
SATUAN KERJA. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 80-99.

Apriyana, A. (2020). *Analisis Temuan Pemeriksaan Terkait Aset Tetap Pada
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016-2018* (Doctoral
dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).

Kirana, Putra, 2013. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No.
16 Pada PT. Graphika Beton. *Jurnal UMRAH*. Jurusan Akuntansi.
Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.

- Mukrim, M., & Evayani, E. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP DESA BERBASIS WEB (PILOT PROJECT PADA KECAMATAN KOTA SIGLI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 159-164.
- Dinar, P. (2016). Manajemen aset tetap (tanah dan bangunan) pemerintah daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- Hidayat, R. (2023). *OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET TETAP TANAH DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN* (Doctoral dissertation, IPDN).